

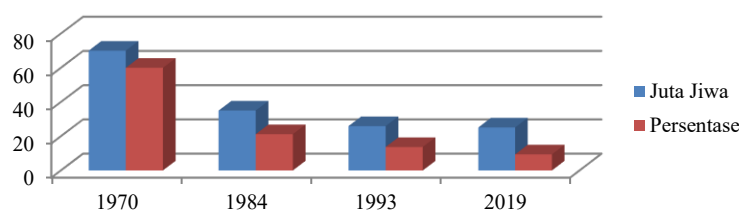
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia (Rini dkk, 2013). Bahkan dalam tataran ekstrim, kemiskinan dianggap sebagai sebab miskinnya suatu negara, sehingga pengentasan masalah kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam setiap capaian program kerjanya. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat Nurkse yang dikutip oleh Kuncoro dalam Andriyanto (2011) yang menyatakan bahwa “negara miskin itu miskin karena dia miskin” (*a poor country is poor, because it is poor*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 1970-an hingga tahun 2019 mengalami tren menurun dalam jumlah penduduk maupun persentase. Namun, sekalipun data kemiskinan menunjukkan penurunan dari periode ke periode tetapi tidak mengasumsikan sirnanya permasalahan kemiskinan di Indonesia. Peran kontrol penuh dari pemerintah masih sangat perlu dilakukan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus terus digalakkan.

Pada tahun 1970, persentase kemiskinan mencapai 60 % setara dengan 70 juta jiwa penduduk miskin. Selanjutnya pada tahun 1984, persentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan secara drastis menjadi 21,2 % yang setara dengan 35 juta jiwa penduduk miskin. Bahkan pada tahun 1993, tingkat kemiskinan di Indonesia mampu memangkas angka kemiskinan menjadi 13,7 % dan setara dengan 25,9 juta jiwa. Akhirnya pada periode Maret tahun 2019, angka kemiskinan berhasil mencapai angka 9,41 % yang setara dengan 25,14 juta jiwa penduduk miskin (BPS, 2019).



Grafik 1.1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1970 – 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Permasalahan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan hak dasar masyarakat yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat antara lain adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan publik (kesehatan, pendidikan, kerja, tanah dan sumber daya alam (SDA), perumahan dan sanitasi air bersih), memburuknya kondisi SDA dan lingkungan hidup (LH), lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta lemahnya jaminan rasa aman dalam bentuk kekerasan dan nonkekerasan (BAPPENAS, 2009).

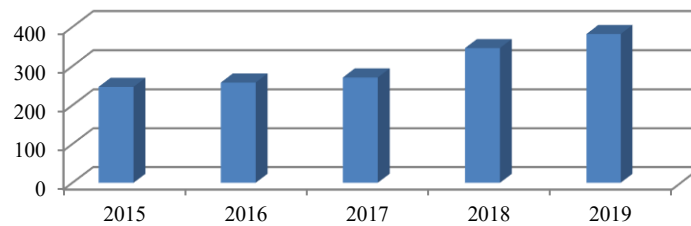
Dampak negatif yang tercermin dari permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah angka pengangguran yang tinggi baik dikarenakan faktor pendidikan masyarakat yang rendah maupun faktor kebijakan pemerintah yang melakukan perampangan tenaga kerja (Ghopur, 2010). Selanjutnya, angka pengangguran tersebut mencerminkan kondisi pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga kebutuhan hidup minimum tidak terpenuhi, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta tingginya tindak kriminal hingga konflik sosial (BAPPENAS, 2009). Bahkan Kumala dkk (2010) menyatakan bahwa dampak kemiskinan pada anak bersifat kerusakan jangka panjang dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan masa kecil yang bahagia disebabkan kondisi perekonomian keluarga yang lemah.

Krusialnya permasalahan kemiskinan yang ditimbulkan mendorong pemerintah untuk menanggulangnya melalui berbagai kebijakan, baik kebijakan sektoral, moneter maupun fiskal (Pratama, 2015). Namun, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut diakibatkan karena lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih bertahan dengan isu sulitnya akses modal untuk masyarakat menengah kebawah. Sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat menengah kebawah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses pemberantasan kemiskinan di Indonesia (Pratama, 2015).

Selanjutnya, secara khusus pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan guna meluncurkan program khusus sebagai upaya pengentasan kemiskinan guna memudahkan akses modal masyarakat menengah kebawah, mulai dari bahan bakar dan tarif dasar listrik bersubsidi, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), subsidi pangan untuk masyarakat miskin termasuk penyediaan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN), peningkatan akses dan kualitas pendidikan termasuk pemberian bantuan operasional sekolah (BOS), pemberdayaan usaha mikro dan kecil termasuk pemberian kredit usaha rakyat (KUR), penguatan modal di sektor pertanian, dan penguatan akses modal di sektor kelautan dan perikanan (BAPPENAS, 2009).

Penelitian empiris terkait dana penanggulangan kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia telah cukup banyak dibuktikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Pasaribu (2018) tentang analisis dampak spasial dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia memperlihatkan hasil bahwa dana desa memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia kecuali Lampung Tengah, Subang, Garut, Buleleng, dan Melawi. Begitu pula Zullini (2019), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana desa mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa di tahun 2015-2017.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika data konkret Kementerian Keuangan (2019) menyatakan bahwa anggaran dana penanggulangan kemiskinan (DPK) yang dianggarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan hampir selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015-2019 secara berurutan dana yang digelontorkan untuk program penanggulangan kemiskinan tersebut mencapai angka Rp247 Triliun, Rp258 triliun, Rp271 Triliun, Rp346 Triliun, dan Rp382 Triliun. Namun, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan khusus tersebut belum mampu secara efektif dan efisien mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen alternatif sebagai partner kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.



Grafik 1.2

Anggaran DPK di Indonesia Periode Tahun 2015– 2019
Sumber: Kemenkeu (2019)

Beik (2009) menyatakan bahwa salah satu instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Pendapat tersebut sejalan dengan Pratama (2015) menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk penyaluran pendapatan serta kekayaan. Zakat juga mempunyai peran strategis dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, serta memiliki sistem kontrol yang cukup baik dalam mekanismenya (Damanhur & Nurainiah, 2016). Sedangkan menurut Musfiqoh (2002) dalam Damanhur & Nurainiyah (2016), pemberdayaan ZIS merupakan upaya untuk mendorong kesejahteraan hidup masyarakat dan upaya untuk meminimalisir ketergantungan dan permasalahan kemiskinan.

Fungsi dan peran zakat dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat telah menjadi bagian dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Program tersebut digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat merupakan kontributor besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Puskas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa zakat mampu mempersempit kesenjangan pendapatan (*income gap*) mustahik sebesar 78 % (Outlook Zakat Indonesia, 2020).

Zakat infaq sedekah (ZIS) merupakan bentuk ibadah *mahdloh* dalam ajaran agama Islam. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga sehingga hukumnya bersifat wajib bagi setiap umat muslim, sedangkan infaq dan sedekah bersifat *sunnah*. Namun, jika diteliti lebih dalam maka ZIS tidak hanya bernilai ibadah secara vertikal dengan Allah tetapi juga bernilai ibadah horizontal yakni memiliki

dampak sosial yang besar terhadap sesama melalui pemberdayaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Nasrullah, 2010). Oleh karena itu, tidak heran jika perintah pelaksanaan ZIS telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, bahkan diulang-ulang sebagai bentuk penegasan. Beberapa firman Allah terkait ZIS ialah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١١٠﴾

Wa aqīmuṣ-ṣhalāta wa ātuz-zakāta warka'ū ma'ar-rāki'īn

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Al Baarah ayat 43)

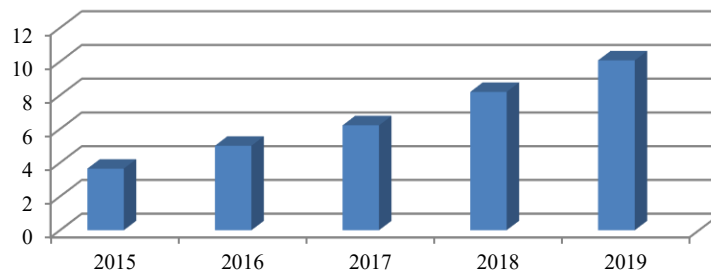
وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٤﴾

yaqūla rabbi lau la ukhharitani ila ajaling qarībin fa aṣṣaddaqtu wa ukun minas-ṣāliḥīn

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?." (Al Munafiqun ayat 10)

Berdasarkan data BAZNAS (2019), terkumpulnya dana ZIS tahun 2015-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Dana ZIS yang terkumpul dari pada tahun 2015 yakni sebesar Rp3,65 Triliun, sedangkan pada tahun 2017 sudah mencapai Rp5,01 Triliun. Jumlah terkumpulnya dana ZIS terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai angka Rp10,07 Triliun. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa potensi dana ZIS yang terkumpul akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, BAZNAS terus berupaya menstimulus peningkatan pengumpulan dana ZIS untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara maksimal (Outlook Zakat Indonesia, 2020).



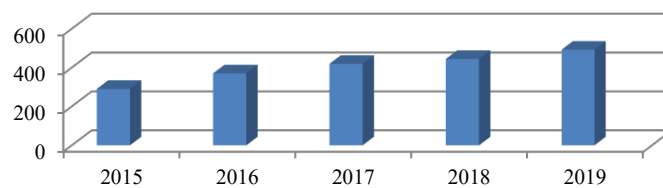
Grafik 1.3
Dana ZIS di Indonesia Periode Tahun 2015– 2019
Sumber: BAZNAS (2019)

Selain program zakat, pendidikan juga disebut-sebut menjadi solusi ampuh sebagai pemutus rantai kemiskinan, sebab melalui jalan pendidikan maka kualitas SDM akan ter-*upgrade* yang selanjutnya akan berimbas pada kesejahteraan ekonominya. Konsep tersebut dikenal dengan sebutan “Lingkaran Setan Kemiskinan” (*vicious circle of poverty*) yang dikenalkan pertama kali oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation In Underdeveloped Countries*. Menurut Putra dan Arka (2018) dalam Rossalia (2019), konsep lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menunjukkan bahwa rantai kemiskinan dapat diputus dengan meningkatkan mutu SDM melalui pendidikan yang berkualitas.

Kosep teori tersebut didukung oleh pemikiran Aimon (2012) dalam Winarti (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan dan keterampilan seseorang maka semakin mudah pula akses bekerja dan berkarya melalui kecanggihan teknologi, sehingga akhirnya dapat meningkatkan standar ekonomi dan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah di bidang pendidikan akan menuai dampak yang baik. Rasidin dan Bonar (2004) dalam setyowati (2014) juga berargumen bahwa tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan sehingga pemerintah sangat berperan penting dalam merumuskan sistem dan mencukupi anggaran pendidikan dengan baik.

Oleh karena itu, kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan cara memberi anggaran khusus di bidang pendidikan. Dana pendidikan tersebut meliputi anggaran pendidikan

untuk Kementerian/Lembaga (L/K), Tunjangan Profesi Guru pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Tunjangan Sertifikasi Dosen, Rehabilitasi Ruang Kelas, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional PTN, Bantuan BidikMisi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Tunjangan Khusus guru PNSD di daerah khusus. Berdasarkan data Kemenkeu RI tercermin bahwa anggaran dana pendidikan mengalami kenaikan hampir setiap tahunnya dan memiliki porsi 20% dari APBN.



Grafik 1.4

Anggaran Dana Pendidikan di Indonesia Periode Tahun 2015– 2019

Sumber: Kemenkeu (2019)

Besarnya anggaran dana penanggulangan kemiskinan (DPK) dan anggaran pendidikan serta besarnya potensi terkumpulnya dana ZIS di Indonesia yang ketiga-tiganya dijadikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan menjadikan peneliti ingin membahas lebih mendalam tentang bagaimana hubungan antara ketiganya dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu terkait hubungan ZIS dan kemiskinan yang dijadikan rujukan penelitian ini diantaranya adalah penelitian Lapopo (2012) yang meneliti tentang pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010 dan hasilnya menyatakan bahwa dana ZIS berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemudian penelitian Seto (2016) yang meneliti pengaruh distribusi dana ZIS di BAZNAS, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2011-2014 dan

hasilnya menyatakan bahwa distribusi dana ZIS di BAZNAS berpengaruh dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian terdahulu terkait hubungan DPK dan kemiskinan yang dijadikan rujukan penelitian ini diantaranya adalah penelitian Misdawita dan Sari (2013) tentang analisis dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif (berbanding terbalik) antara subsidi dan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan Andaresta (2019) meneliti pengaruh antara bantuan sosial dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2007-2017, hasilnya menunjukkan nilai koefisien negatif antara bantuan sosial dan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian terdahulu terkait hubungan dana pendidikan dan kemiskinan yang dijadikan rujukan penelitian ini diantaranya adalah penelitian Setyowati (2014) tentang pengaruh alokasi dana program nasional pemberdayaan masyarakat, belanja daerah untuk kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2008-2011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Selanjutnya, hasil penelitian Seto (2016) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik (negatif) dengan kemiskinan di Indonesia.

Adapun penelitian ini berfokus pada peninjauan keeratan hubungan kebijakan dana zakat infaq shadaqah (ZIS), kebijakan pemerintah terkait besarnya penggelontoran dana penanggulangan kemiskinan (DPK), dana pendidikan, dan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini secara bersama-sama mengkombinasikan sudut pandang alternatif kebijakan pemerintah dan alternatif kebijakan syariat Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu keunikan dalam penelitian ini adalah, panjangnya rentang periode data dalam penelitian ini, yakni periode 2002-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara zakat infaq shadaqah (ZIS) dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019.
2. Untuk mengetahui hubungan antara dana penanggulangan kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019.
3. Untuk mengetahui hubungan antara dana pendidikan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan memakai metode pendekatan korelasional sederhana yakni korelasi *Karl Pearson (Product Moment)*. Korelasi *Karl Pearson* bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu serta situs resmi BPS, BAZNAS, dan Kemenkeu. Data tersebut mencakup data anggaran DPK, anggaran dana pendidikan, dana ZIS di BAZNAS, dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Rentang data yang diolah dalam penelitian ini adalah periode tahun 2002-2019.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

1. Dana ZIS berhubungan erat dan signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia rentang periode tahun 2002-2019.
2. Dana penanggulangan kemiskinan (DPK) berhubungan erat dan signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia rentang periode tahun 2002-2019.
3. Dana pendidikan berhubungan erat dan signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019.

1.6 Kontribusi Riset

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap upaya pengentasan kemiskinan, terutama upaya melalui program ZIS, program anggaran DPK, dan program anggaran dana pendidikan.

2. Memberikan bahan informasi bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, *stakeholder* sebagai *partner* kerja pemerintah dalam menstimulus kebijakan yang ada, akademisi sebagai *partner* terobosan dan inovasi bagi kebijakan pemerintah, dan masyarakat sebagai objek utama dalam tujuan akhir setiap kebijakan pemerintah.
3. Menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dan disempurnakan.

1.7 Sistematika Penulisan

1. Bab I yakni pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metodologi penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. Bab ini membahas gambaran permasalahan yang akan diteliti.
2. Bab II yakni tinjauan pustaka, menjelaskan tentang kemiskinan, hubungan ZIS terhadap kemiskinan, hubungan DPK terhadap kemiskinan, hubungan dana pendidikan terhadap kemiskinan, menentukan hipotesis, dan penelitian terdahulu. Bab ini menjadi landasan teori untuk bab IV.
3. Bab III yakni metode penelitian, menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, identifikasi dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini menjadi panduan pengolahan data dalam penelitian.
4. Bab IV yakni hasil penelitian dan pembahasan, memaparkan tentang deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan. Bab ini disusun sebagai upaya pembuktian hipotesis peneliti.
5. Bab V yakni penutup, memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan untuk para pemangku kepentingan.